

**MANAJEMEN BENCANA  
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS**

**Oleh:**

**Saraswati Ayudina Permana**

[saraswatiayudina@gmail.com](mailto:saraswatiayudina@gmail.com)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jl. RE Martadinata Nomor 150 Ciamis

*Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Kecamatan Sadananya bahwa manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis belum cukup efektif. Hal ini karena BPBD Kabupaten Ciamis kekurangan sumber daya manusia kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang dan yang terakhir karena tidak efektifnya waktu dalam penanggulangan bencana yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya dimana rangkaian kegiatan untuk memperoleh data itu bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu kemudian hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses bagaimana manajemen bencana itu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Ciamis, kemudian bagaimana hambatan yang dirasakannya serta upaya yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Ciamis sendiri guna mengurangi hambatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa manajemen bencana di BPBD Kabupaten Ciamis pada tahapan pra bencana dapat terlaksana cukup baik dikarenakan adanya kesiapsiagaan petugas sewaktu-waktu terjadi bencana namun bagian mitigasi dengan memasang spanduk-spanduk himbauan belum dapat terlaksana, kemudian saat tanggap darurat dan pasca bencana itu semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan alur yang ada pada Standar Pelayanan Publik yang ada di BPBD Kabupaten Ciamis, namun sayangnya walaupun pekerjaan dilakukan sesuai dengan alur SPP yang berlaku pada waktu pelaksanaannya tidak dapat sesuai dengan yang dicantumkan pada SPP. Terakhir dalam hal SDM yang dimiliki pun BPBD Kabupaten Ciamis masih kekurangan sehingga terkadang pekerjaan yang dilakukan para pegawai pun melebihi tupoksinya masing-masing.*

***Kata kunci: Manajemen Bencana, BPBD Kabupaten Ciamis***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang secara alami maupun karena ulah manusia, terjadi secara mendadak atau berangsur-angsur, dan menimbulkan akibat yang merugikan, sehingga masyarakat dipaksa untuk melakukan tindakan penanggulangan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang rawan akan bencana. Hal ini disebabkan karena secara geografis, Indonesia berada diantara dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sehingga akibatnya rawan terkena bencana Tsunami. Wilayah Indonesia dikenal juga sebagai wilayah tektonik (lempeng) aktif, hal itu disebabkan karena Indonesia berada di tiga lempeng tektonik aktif utama, yaitu "Eurasia di sebelah utara, Samudera Hindia-Australia di sebelah selatan dan lempeng Pasifik di timur." (Kusumasari, 2014: 74). Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia diantaranya meliputi gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, gempa bumi dan tsunami di Pulau Nias tahun 2005, gempa bumi di Yogyakarta

tahun 2006. Peristiwa itu cukup menjadi bukti bahwa Indonesia adalah wilayah yang rawan akan bencana. Fakta inilah yang kemudian mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dirumuskan tentang pengertian bencana dan jenis-jenis bencana yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dalam undang-undang ini dijabarkan juga jenis-jenis bencana yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

3. Bencana alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
4. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dari pengertian dan jenis-jenis bencana diatas, bisa dikatakan bahwa bencana dapat memiliki dampak yang serius dan menimbulkan kerusakan baik itu dibidang ekologi, ekonomi, dan kerusakan-kerusakan lainnya yang berkaitan erat dengan manusia dan lingkungannya. Untuk mengatasi hal itu, maka Pemerintah Indonesia berusaha melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana yang terjadi, dengan cara membuat suatu lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diberi nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pembentukan lembaga penanggulangan bencana ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bencana dan juga dapat mengurangi resiko bencana. Selain di tingkat pusat, lembaga penanggulangan bencana juga dibentuk di daerah-daerah, yang diberi nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disingkat dengan BPBD yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan salah satunya berada di Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu daerah yang berada di Wilayah Provinsi Jawa barat, yang memiliki karakteristik geografis yaitu berupa pegunungan terutama di wilayah utara dan di dikelilingi oleh aliran sungai terutama di wilayah selatan, sehingga menjadikan Kabupaten Ciamis menjadikan daerah yang rawan akan bencana. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Tugas dan fungsi dari BPBD adalah melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaksanakan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya potensi ancaman bencana yang sering terjadi di Kabupaten Ciamis adalah berupa gempa bumi, tanah longsor/keretakan tanah, banjir, angin ribut/puting beliung, dan kebakaran.

Hal ini dikarenakan letak geografis Kabupaten Ciamis yang terdiri dari mayoritas pegunungan dan struktur tanah yang labil, dimana potensi ancaman bencana ini terdapat di daerah Ciamis bagian utara. Dengan mempertimbangkan potensi ancaman bencana yang muncul maka diperlukan manajemen bencana yang baik dan terencana untuk meminimalkan resiko terjadinya bencana. Pada praktiknya BPBD yang meliputi kegiatan menganalisis pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, aktuating (pengarahan/penggerakan), dan pengawasan.

Dengan kondisi di atas, maka Kecamatan Sadananya berpotensi terhadap terjadinya bencana seperti tanah longsor. Adapun bencana yang pernah terjadi dalam skala yang relatif cukup besar yaitu Gempa Bumi yang mengakibatkan kerugian baik korban nyawa dan kerugian materi yang cukup besar.

Melihat topografi Kecamatan Sadananya ini maka diperlukan suatu manajemen bencana yang baik agar dapat meminimalisir resiko bencana yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil observasi untuk penelitian di Wilayah Kecamatan Sadananya terlihat bahwa pelaksanaan manajemen bencana masih belum berjalan dengan efektif.

## B. LANDASAN TEORITIS

Mengenai pengertian manajemen bencana, Nurjanah *et al.* (2013: 42) mengemukakan bahwa:

Manajemen bencana (*disaster management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen

bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan menurut W. Nick Carter (dalam Nurjanah *et al.*, 2013: 44) definisi manajemen bencana yaitu: 'An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery.'

Dalam wikipedia, Emergency Management (2007) diartikan sebagai berikut:

Penanggulangan bencana adalah proses yang terus menerus dimanfaatkan individu, kelompok, dan masyarakat berusah mengatasi risiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah.

Shaluf (Kusumasari, 2010:19) mendefinisikan manajemen bencana sebagai 'Istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana.'

Kusumasari (2014: 19-20) mengungkapkan bahwa:

Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilitas sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik.

Sedangkan *National Fire Protection Association* (NFPA) 1600: *Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs* (Soehatman Ramli, 2010:10) mendefinisikan manajemen bencana adalah 'Upaya sistematis komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkannya.'

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh pemerintah, relawan, dan pihak-pihak swasta dalam merespon terjadinya bencana mulai

dari sebelum terjadinya bencana hingga setelah terjadinya bencana.

### **Tahapan Manajemen Bencana**

Menurut Nurjanah *et al.* (2013:99-101), kegiatan penyelenggaraan manajemen bencana dapat dibagi dalam 3(tiga) fase atau tahapan, yaitu:

#### a. Pra-Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana meliputi: (1) dalam situasi tidak terjadi bencana dan (2) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: (1) perencanaan penanggulangan bencana, (2) pengurangan risiko bencana, (3) pencegahan, (4) pemanduan dalam perencanaan pembangunan, (5) persyaratan analisis risiko bencana, (6) pelaksanaan dan penegakan tata ruang, (7) pendidikan dan pelatihan, dan (8) persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, kegiatan yang dilakukan adalah: (1) kesiapsiagaan, (2) peringatan dini, dan (3) mitigasi bencana.

#### b. Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi: (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, (2) penentuan status keadaan darurat bencana, (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terhadap masyarakat terkena bencana, (4) pemenuhan kebutuhan dasar, (5) perlindungan terhadap kelompok rentan, (6) pemulihan dengan segera sarana dan prasarana.

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi dan sumber daya, dilakukan untuk mengidentifikasi: (a) cakupan lokasi bencana, (b) jumlah korban, (c) kerusakan sarana dan prasarana, (d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan (e) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: (a) pencarian dan penyelamatan korban, (b) pertolongan darurat, dan (c) evakuasi korban ke tempat aman atau ke tempat penampungan sementara.

#### c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana meliputi: (a) kebutuhan air bersih dan sanitasi, (b) pangan, (c) sandang, (d) pelayanan kesehatan, (e) pelayanan psikososial, (f) penampungan tempat hunian.

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi: pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan pelayanan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok yang rentan terdiri atas: (a) bayi, balita, dan anak-anak, (b) ibu yang sedang mengandung atau menyusui, (c) penyandang cacat, dan (d) orang lanjut usia.

d. Pasca Bencana

Setelah terjadi bencana dan selesainya masa tanggap darurat, diharapkan korban bencana atau pengungsi (jika ada pengungsi) kembali ke rumah/tempat asal dimana mereka tinggal. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan mereka dapat berjalan kembali. Ini berlaku untuk korban bencana/pengungsi yang bisa kembali ke tempat semula dimana mereka tinggal. Dalam hal ini tidak memungkinkan untuk kembali, bisa ditempuh jalan lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun non-fisik.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Manajemen Bencana yang diungkapkan oleh Nurjanah *etal.* (2013: 99-101) dimana manajemen bencana terbagi menjadi tiga tahap, yaitu Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.

## C. METODE PENELITIAN

### C.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 'Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.'

### C.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari 02 Februari sampai dengan 31 Juli 2018, dan tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis.

### C.3 Subjek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak 1 orang;
5. Kasubag Program, sebanyak 1 orang;
6. Kepala Seksi Pencegahan, sebanyak 1 orang;
7. Kepala Seksi Kesiapsiagaan, sebanyak 1 orang;
8. Kepala Seksi Logistik, sebanyak 1 orang;
9. Kepala Seksi Rehabilitasi, sebanyak 1 orang.

### C.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, oleh karena itu seorang peneliti dituntut terampil dalam mengumpulkan data yang valid dan benar-benar menjadi data yang jenuh. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2012:291) adalah: Berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.
  - a. Studi literatur yaitu melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ada.
  - b. Studi dokumentasi yaitu memperoleh data sekunder dari laporan, dokumen, literature dan hasil penelitian sejenis yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Untuk menentukan apakah dokumen itu layak atau tidak untuk dijadikan sumber data maka harus melakukan kritik internal dan kritik eksternal yaitu:
    - 1) Kritik internal harus berusaha mengkaji dan menelaah secara seksama tentang materi-materi dokumen tersebut

mengenai keaslian dan kebenarannya, serta harus diperhatikan apakah materi tersebut masih layak digunakan atau tidak.

- 2) Kritik eksternal mencoba mengkaji, menelaah tentang orang atau lembaga yang membuat dokumentasi tadi, harus dilihat ada tidaknya lembaga yang menerbitkan naskah atau dokumen tersebut.
2. Studi lapangan (*field research*) yaitu meneliti secara langsung variabel-variabel yang dijadikan obyek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan datanya sebagai berikut :
    - a. Observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
    - b. Wawancara, yaitu percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Esterberg (dalam Sugiyono, 2014: 386-387) membagi wawancara kedalam tiga jenis, yaitu:
      - a. Wawancara terstruktur (*Structured Interview*);
      - b. Wawancara semistruktur (*Semistruktur Interview*);
      - c. Wawancara terstruktur (*Unstructured Interview*).

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit tentang manajemen bencana oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Wilayah Kecamatan Sadananya.

### 3. Triangulasi

Sugiyono (2014:397) mengatakan bahwa triangulasi diartikan sebagai “Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.”

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari

sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

## C.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992:16) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data yakni sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. *Data display* (Penyajian data)

Miles and Huberman dan Saldana (2014:32) menyatakan ‘Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu bentuk yang padu.’ Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa saja yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah dilakukan reduksi data, peneliti menyusun dan menyajikan data terkait dengan Manajemen Bencana oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Wilayah Sadananya.

### 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini, peneliti memiliki kesimpulan awal terlebih dahulu. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat atau mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal yang dibuat ternyata didukung oleh data-data yang diperoleh selanjutnya, yaitu bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data. Disini peneliti telah melakukan verifikasi dari data dan bukti-bukti yang didapat dari informan untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini..

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **D.1 Manajemen Bencana Oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Manajemen Bencana oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Wilayah Kecamatan Sadananya belum dapat berjalan dengan efektif, ini dikarenakan sarana dan prasarana yang berada di BPBD Kabupaten Ciamis memang masih belum lengkap, kemudian kapasitas SDM dan juga SDM yang masih kurang sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan Manajemen Bencana dengan baik. Ada pula mengenai hal SDM di BPBD Kabupaten Ciamis memang masih terbatas sehingga kinerja BPBD belum dapat dilakukan secara maksimal.

### **D.2 Hambatan didalam Manajemen Bencana Oleh BPBD Kabupaten Ciamis di Kecamatan Kabupaten Ciamis**

Dalam melaksanakan manajemen bencana, BPBD Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan yang dihadapi BPBD Kabupaten Ciamis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama Maulana A. Suhandi yaitu:

“Masalah SDM karena tidak adanya sarjana yang berasal dari program studi mengenai teknik kebencanaan dan jumlah PNS yang berkurang.”

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD.

Itu pun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Maulana A. Suhandi pada saat wawancara yaitu:

“Kapasitas masyarakat masih rendah dikarenakan mereka masih awam sehingga kemampuannya belum sampai pada pengurangan resiko bencana, kemudian payung hukum yang dimilikinya pun masih

belum kuat. Karenanya apabila BPBD Kabupaten Ciamis akan melakukan suatu kegiatan terkadang terhambat akibat hal tersebut.”

3. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat;
4. Masih kurangnya keterlibatan aparatur dalam penentuan kebijakan yang diambil (program/kegiatan) itu dikarenakan kurangnya sumber daya kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Ciamis;
5. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana karena keterkaitan dengan lembaga/instansi dalam hal pengelolaan lingkungan berbasis manajemen resiko bencana sedangkan Pembentukan FPRB serta Desa Tangguh, merupakan kerjasama serta di fasilitasi oleh NGO (IOM).

Keseluruhan hambatan tersebut berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti di BPBD Kabupaten Ciamis, dan seluruhnya hampir sesuai dengan wawancara yang dilakukan.

### **D.3 Upaya yang Oleh BPBD Kabupaten Ciamis Terkait Manajemen Bencana di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis**

Dalam mengatasi atau mengurangi hambatan-hambatan dalam manajemen bencana ada beberapa upaya yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Ciamis dimulai dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangannya SDM yaitu dengan mengajukan kekurangan dan permohonan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Ciamis agar kekosongan tersebut segera diisi kembali, namun harus menunggu proses mutasi dilakukan oleh Bupati Kabupaten Ciamis, kemudian dengan pegawai yang kurang pengetahuannya akan teknik kebencanaan maka diikuti sertakan diklat.

Dengan mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Ciamis menjalankan program/kegiatan BNPB upaya tersebut tengah di lakukan misalnya dengan pembentukan FPRB (forum pengurangan resiko bencana) termasuk mempersiapkan masyarakat melalui pembentukan Desa Tangguh yang telah

dilaksanakan di desa Gunungsari Kecamatan Sadananya. Upaya penanggulangan bencana ini juga yang dilakukan BPBD provinsi Jawa Barat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh BNPB yaitu, manajemen pengurangan resiko bencana diantaranya melalui pembentukan Desa Tangguh.

BPBD Kabupaten Ciamis pun dalam upaya penanggulangan bencana menitikberatkan pada aspek pengurangan resiko bencana (dari responsif ke preventif) sehingga dampak yang ditimbulkan diharapkan relatif kecil.

BPBD Kabupaten Ciamis juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan sesuai dengan SOP dan tidak akan jauh atau melenceng daripada tupoksi yang dimiliki masing-masing aparat.

## **E. PENUTUP**

### **E.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen Bencana di BPBD Kabupaten Ciamis untuk Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Sadananya dalam tahapan pra bencana telah dilaksanakan cukup baik karena telah terlaksananya program Desa Tangguh dan Sekolah Gunung. Kemudian pada tahapan tanggap darurat BPBD Kabupaten Ciamis dapat melaksanakan evakuasi dan mendirikan posko bencana. Sedangkan terakhir pada tahapan pasca bencana BPBD Kabupaten Ciamis belum dapat melaksanakan dengan baik dikarenakan sumber daya yang kurang, baik itu sumber daya manusia dan juga sarana pra sarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Ciamis. Dimana dalam hal tersebut dapat menimbulkan kelambatan dalam pemulihan daerah pasca bencana. Sumber Daya BPBD Kabupaten Ciamis kurang karena kekosongan posisi-posisi aparat yang cukup berperan penting seperti Kasi Kedaruratan dan Kasi Rekonstruksi.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Ciamis dalam Manajemen Bencana di Wilayah Kecamatan Sadananya yaitu sebagai berikut:
  - a. Dalam penanganan suatu bencana BPBD Kabupaten Ciamis kurang dapat berkoordinasi secara baik bersama organisasi-organisasi yang berhubungan dengan penanganan bencana;
  - b. Kurangnya dana dari pemerintah Kabupaten yang menyebabkan BPBD Kabupaten Ciamis terhambat dan cukup lambat dalam menangani suatu bencana;

- c. Kurangnya SDM atau personil di bidang Kedaruratan Logistik, dan bidang Rehabilitasi Rekonstruksi yang ada di BPBD Kabupaten Ciamis.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Ciamis untuk mengurangi hambatannya tersebut diantaranya adalah:
  - a. Setiap awal tahun BPBD Kabupaten Ciamis selalu melaksanakan koordinasi seluruh SKPD Kabupaten Ciamis agar manajemen bencana di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik;
  - b. Memaksimalkan program desa tangguh yang dilaksanakan setiap tahunnya di desa yang berbeda;
  - c. Melakukan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat oleh tiap-tiap bidang.

### **E.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Ciamis yang sudah melakukan koordinasi secara rutin setiap awal tahun seharusnya koordinasi tersebut tidak dilakukan hanya pada awal tahun saja, tetapi seharusnya awal tahun kemudian pertengahan tahun dan yang terakhir yaitu akhir tahun itu dilakukan agar manajemen bencana di Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan efektif;
2. Upaya yang telah dilakukan BPBD dalam melaksanakan manajemen bencana supaya lebih dikembangkan dengan menambah desa yang diberikan pelatihan desa tangguh, agar masyarakat desa yang berada di Kabupaten Ciamis memiliki kapasitas siaga dalam bencana jika sewaktu-waktu terjadi;
3. BPBD Kabupaten Ciamis harus dapat memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang dimilikinya walaupun beberapa bidang terdapat kekosongan posisi yang cukup penting dalam manajemen bencana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Kusumasri, Bevola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta : Dian Rakyat
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi: Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Aksara

### **Dokumen-Dokumen**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Profil BPBD Kabupaten Ciamis Tahun 2017